

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Busro , Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Chomsah , Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Djojodirdjo , M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta : Pradnya Paramita.

Effendie, Bachtiar, 1983,*Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.

Faudi, Munir, 2002,*Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Nasional Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta : Djambatan.

Harun, Badriyah, 2013,*Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

Projodikoro, R. Wirjono, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Sumur.

Purwaka, Tommy Hendra, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982,*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah*, Jakarta: Bina Cipta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960

KUH Perdata

C. Internet

AP. Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah di Indonesia, KOMPAS 24 September 1992, [www, kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 18 Oktober 2016.

Bintara Sinaga, “Keberadaan Grik sebagai bukti Surat Tanah”.
www.kompas.com, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016.

<https://joeharry-serihukumbisnis.blogspot.co.id/2009/06/kedudukan-hukum-girik-terhadap.html>, diakses tanggal 17 Juli 2016.

Perkembangan Administrasi Pajak atas Tanah Setelah diberlakukannya UU PBB,
www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 13 November 2016.